

Perusahaan Multinasional Dan Tujuan-tujuan Pembangunan

Oleh Rozy Munir dan Prijono Tjiptoherijanto

Summary:

The purpose of this article is to analyze economic consequences of the establishment of the multinational corporations and their impact on the economic development in third countries, such as is Indonesia.

There are many negative economic consequences which unknowingly become a burden to the economy of the host country. Discrepancies in money wages, for instance, result in an upward trend in the price level in areas where multinational corporations have been established. Whilst the often cited benefit accruing from "transfer of technology" often does not materialize, instead the multinational corporations succeed in cornering the market of raw materials and their marketing. Furthermore the idealistic hope that the presence of the multinational corporations would alleviate the problem of unemployment usually remain a hope. This can be easily appreciated if one remembers that multinational corporations, which employ capital-intensive method, by definition, can not be expected to encourage the development of labor-intensive industries. Another consequence which until recently escaped the attention of those who weigh the advantages and disadvantages of the establishment of the multinational corporations is what is commonly referred in the jargon to an "external diseconomies". The most glaring example being the pollution of the environment which has wide ranging economic and medical ramifications. All of the above constitute "a burden" that the host country must shoulder.

If this article does not enumerate the necessary policies to be taken to prevent the occurrence of these negative consequences of multinational corporations, it is because it was not the intention of the writers to do so. Policies governing the multinational corporations are the responsibility of the Government, whilst what the academics can and should do is make available the pertinent data and offer advice which can be used to base the governmental policies.

Pendahuluan

Sejak sebelum 1945 investasi asing di Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Setelah kemerdekaan mereka masih tetap memegang peranan, ingat saja beberapa "maatschappij" seperti Borsumij, Jacobsen van den Berg, Lindeteves, Internatio dan sebagainya. Dominasi

ini berakhir dengan terjadinya nasionalisasi oleh pemerintah pada tahun 1958.

Pada waktu itu boleh dikatakan Indonesia hanyalah sebagai sumber bahan baku utama yang murah untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda, yang hal ini juga dialami oleh "Malaya", Singapura dan Philipina untuk kepentingan negara penjajahnya. Dengan berakhirnya Perang Dunia II, situasi politikpun berubah, banyak negara termasuk Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Negara-negara yang baru ini ingin mempunyai konsepsi "ekonomi nasional" sendiri. Dan proses ke arah itu tidaklah mudah mengingat masih kurangnya pengalaman di bidang management, langkanya tenaga terlatih serta kecilnya modal yang ada. Bertepatan dengan situasi tersebut datanglah "angin baru" yang mempunyai efek luas pada perekonomian negara-negara baru ini, yaitu dengan datangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Ingat saja perusahaan-perusahaan seperti General Motor; IBM, Unilever, General Electric dan sebagainya. Perusahaan multinasional ini biasa disebut dengan "International Corporation", "Multinational Firm", "Supranational Enterprise" dan masih banyak nama lagi untuk itu.

Ciri Perusahaan Multinasional

Belum ada standardisasi daripada ciri atau definisi perusahaan multinasional. UNDP misalnya menyebutkan bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang bertujuan memperoleh keuntungan yang biasanya dimiliki oleh swasta dan mempunyai kontrol atas kekayaannya uang berupa pabrik-pabrik, tambang, penjualan dan kantor-kantor, beroperasi di beberapa negara lain dan mempunyai organisasi sentral yang berpusat di suatu negara di mana dia berasal.¹

Sedangkan Prof. Sidney E. Rolfe, memberikan definisi: suatu perusahaan yang mempunyai proporsi penjualan, investasi, produksi dan tenaga kerja di luar negeri sebesar 25% atau lebih.²

Dari kedua definisi ini tampak jelas bahwa operasi perusahaan multinasional berada di negara-negara lain dan berinduk pada pusat organisasi di negara asal serta menciptakan tenaga-tenaga kerja di negara di mana dia beroperasi.

Alasan yang mendorong perusahaan multinasional bergerak di luar batas negaranya sebenarnya disebabkan tujuan mencari keuntungan maksimal, menghindari undang-undang anti trust di negaranya, mendapat-

1 UNDP, "Changing Factors in World Development," Global 1, Development Issue Paper No. 3, New York, 1975, p. 2.

2 Rolfe, E. Sidney, The International Corporation, Transnational Interest and National Sovereignty, Columbia Journal of World Business, Vol. 4, March 1969, p. 2.

kan pasaran baru serta ingin memperoleh sumber "input" termasuk tenaga buruh yang murah.

Pengaruh terhadap Upah

Dari pembahasan di atas jelas bahwa salah satu tujuan dari perusahaan multinasional adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang relatif murah.

Sebagai perbandingan tentang upah tenaga kerja, kalau pekerjaan itu dikerjakan di negara-negara berkembang, ongkos buruh bisa ditekan sampai lima sampai enam kali bahkan lebih, dibandingkan kalau dikerjakan di negara maju. Dua tabel berikut menggambarkan tingkat perbedaan upah buruh perusahaan-perusahaan multinasional dari Amerika Serikat dan Jepang.

Tabel 1
Upah Buruh per Jam di Beberapa Perusahaan Multinasional Amerika di Negara-negara Berkembang, 1970

	Upah Buruh per Jam (\$)		Rasio (2):(1)
	Negara Berkembang (1)	Amerika Serikat (2)	
Elektronik			
Hong Kong	0,27	3,12	11,8
Mexico	0,53	2,31	4,4
Taiwan	0,14	2,56	18,2
Asembling Mesin			
Hong Kong	0,30	2,92	9,7
Mexico	0,48	2,97	6,2
Taiwan	0,38	3,67	9,8
Korea Sel.	0,28	2,78	10,1
Pakalan			
Costa Rica	0,38	2,28	6,7
Honduras	0,45	2,27	5,0
Trinidad	0,40	2,49	6,3

Sumber: diturunkan dari ILO, *The Impact of Multinational Enterprise of Employment and Training*, Geneva, hal. 13.

Tabel 2
Upah Buruh per Jam pada Perusahaan Asembling di Jepang dan di Beberapa Negara Asia,
1965

Negara	Index Upah
Jepang	100
Korea Selatan	20
Pakistan	32
India	33
Burma	33
Sri Lanka	36
Thailand	38
Philipina	42
Singapura	61

Sumber: T. Ozawa; *Transfer of Technology from Japan to Developing Countries*, UNITAR, 1971.

Dari kedua tabel di atas, terlihat bahwa dengan memproduksi barang yang sejenis, perusahaan multinasional ini memperoleh keuntungan berlipat ganda dengan penggunaan tenaga kerja yang lebih murah.³ Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan assembling di Jepang harus membayar sekitar 500 yen per jam untuk upah buruhnya. Dengan memproduksi barang yang sama di Philipina, perusahaan tersebut cukup mengeluarkan biaya untuk memakai tenaga lokal sebesar 210 yen per jam. Perbedaan ini menyebabkan perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan yang sama dengan jumlah produksi yang lebih kecil.⁴

Penetrasi Teknologi Modern

Aspek lain yang perlu dibahas adalah mengenai alasan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional ini membawa keuntungan dengan adanya apa yang disebut "transfer of technology".

3 Salah satu sebab "murahnya" tenaga kerja di negara-negara berkembang adalah karena melimpahnya tenaga kerja dan rendahnya tingkat pendidikan. "Conventional Wisdom" semacam ini dapat dilihat misalnya dari: W.A. Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labor," *Manchester School* 22, May, 1954, Gustav Ranis and J.C.E. Fei, "A Theory of Economic Development," *American Economic Review* (51) (1961) and B.F. Johnston and J.W. Mellor "The Role of Agriculture in Economic Development," *American Economic Review*, September 1961.

4 Selama keuntungan maksimal tercapai bila "biaya marginal (marginal cost)" sebanding dengan "keuntungan marginal (marginal revenue)", maka perusahaan multinasional ini akan mencapai tingkat tersebut dengan tingkat produksi yang lebih rendah dari di negara asal.

Salah satu cara daripada transfer teknologi ini ialah melalui "transfer langsung (direct transfer)" misalnya pengadaan barang-barang modal atau mesin-mesin atas dasar pesanan perusahaan-perusahaan nasional, penyediaan tenaga-tenaga ahli serta konsultan yang dikontrak oleh perusahaan-perusahaan produksi nasional dan sebagainya.

Cara lain dengan melalui "transfer tidak langsung (indirect transfer)" yaitu dengan adanya investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara berkembang.

Biasanya teknologi yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan ini tidak sesuai dengan kebutuhan serta kondisi di negara-negara berkembang, karena pada dasarnya teknologi ini diciptakan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kebutuhan sesuai dengan kondisi negara-negara maju yang masyarakatnya mempunyai income yang tinggi, dan ditujukan pada pasar yang besar. Teknologi ini pada umumnya bersifat padat modal (capital intensive), rumit dan meminta persyaratan buruh yang "qualified." Dan apabila tenaga buruh menjadi sulit dan mahal maka tenaga ini diganti dengan mesin-mesin otomatis. Sering pula teknologi diciptakan untuk mendapatkan barang-barang sintetis pengganti barang-barang alamiah yang tidak bisa didapat di negara-negara maju.

Masalahnya akan menjadi lebih sulit lagi karena mesin-mesin yang di-datangkan ke negara berkembang sangat kompleks dan membuat "keharusan" si pemakai untuk selalu bergantung pada perusahaan multinasional misalnya untuk mengganti "spare part-nya yang terpaksa harus diimpor sedangkan persediaan devisa sangat terbatas.

Dengan hadirnya teknologi yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan multinasional ke negara-negara berkembang maka terjadi dualisme pada sistem ekonomi negara-negara ini, yaitu dengan teknologi modern dan teknologi tradisional atau sederhana. Sebagai akibatnya, mereka cenderung untuk saling bersaing guna mendapatkan sumber-sumber bahan baku yang jumlahnya terbatas. Sebagai gambaran adanya persaingan yang tidak sehat antara dua teknologi ini bisa dilihat pada tabel 3 dan 4 berikut.

Dari tabel 3 dan 4 tampak bahwa selain pasaran dalam negeri dikuasai sepenuhnya; lebih dari 90%; oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini, juga peningkatan penjualan yang dramatis memberi tanda akan kecenderungan monopoli pasaran dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sekali monopoli pasaran telah jatuh ke tangan satu pihak, maka dengan mudah stabilisasi harga pasar terancam dan seterusnya terjadi kegoncangan dalam perekonomian masyarakat.⁵

5 Untuk landasan teoritis, dapat dibaca: James E. Henderson and Richard E Quandt, "Microeconomic Theory: A Mathematical Approach", 2nd ed., Mc. Graw Hill, Tokyo: 1971, chapter

Tabel 3
Tingkat Perkembangan Penjualan Perusahaan Multinasional (Subsidiaries of Multinational Corporations) dan Perusahaan Industri Nasional, 1961-1965

Negara	Tingkat perkembangan Penjualan per tahun		Ratio (1):(2)
	Perush. Multinas. (%)	Perush. Industr. Nas. (%)	
	(1)	(2)	
Argentina	13,7	55,7	2,40
Brazil	4,7	2,0	2,35
Mexico	16,9	77,4	2,28
Venezuela	13,2	9,4	1,40
Philippina	11,8	5,9	2,00

Sumber: Cepal, *Estudio Economico de America Latina*, 1970. Diturunkan dari ILO, *The Impact of Multinational Enterprise on Employment and Training*, Geneva: ILO, 1976, hal. 6.

Tabel 4
Distribusi Geografis daripada Penjualan dari Perusahaan Multinasional (%)

Negara tempat operasi	Perush. Multinas. (1971)	Amerika Serikat	Perush. Multi. (1968)	Lainnya
	Pasar Dalam Negeri	Expor	Pasar D.N.	Expor
Amerika Utara	97,3	2,7	96,1	3,9
Amerika Latin	97,1	2,9	93,3	6,7
Eropa	92,4	7,6	91,5	8,5
Afrika dan Timur Tengah	95,1	4,9	94,2	5,8
Asia dan Oceania	91,0	9,0	90,6	9,4

Sumber: J.W. Vaupel, J.P. Curham: *The World's Multinational Enterprises Centre d'etudes industrielles*, Geneva, 1974, hal. 381-382.

Jadi, apa yang diharapkan oleh negara-negara berkembang, bahwa perusahaan-perusahaan multinasional ini akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan ekonomi mereka, khususnya dalam masalah pengetrapan teknologi modern, agaknya jauh dari kenyataan. Malah sebaliknya, tak jarang perusahaan-perusahaan ini memakai modal domestik dalam operasinya daripada membawa modal dari negara mereka sendiri. Keadaan tersebut menjadi lebih parah disebabkan kenyataan menunjukkan bahwa bank-bank di negara-negara sedang berkembang lebih berminat meminjamkan modal ke perusahaan-perusahaan ini daripada perusahaan-perusahaan lokal, dengan alasan 'resiko bank'.

6, dan George J. Stigler, *"The Theory of Price,"* 3rd ed., The Mac. Millan Co, New York: 1968, chapter 7.

Menghadapi Masalah Pengangguran

Menurut Badan Penanaman Modal Asing, jumlah investasi modal asing yang disetujui pemerintah selama 1967-1975 ialah sebesar \$ 4967 juta yang terbagi dalam lebih dari 800 proyek, dengan distribusi terbesar pada sektor industri 58% (seperempatnya pada industri tekstil), tambang 18% dan kehutanan 10%, sedangkan pertanian hanyalah 3% saja. Dibandingkan dengan modal dalam negeri dalam jangka waktu yang hampir sama, 1968-1975, perbandingannya tidaklah banyak berbeda. Besar modal dalam negeri ialah Rp 171.714 juta atau \$ 4197 juta (kurs \$ 1 = Rp 415), tetapi terbagi dalam 2400 proyek. Seperti halnya modal asing modal dalam negeri pun tidak menempatkan pertanian sebagai sasaran utama (hanya 5%), tetapi juga pada industri yang berjumlah 67%.

Perbandingan kedua sektor ini, perusahaan asing (termasuk perusahaan multinasional) dan perusahaan dalam negeri, akan menjadi menarik kalau kita lihat pada lokasi dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Lokasi perusahaan asing ini 45% berada di Jawa dan 29% di Sumatera.⁶ Sedang kalau dilihat secara jumlah proyek maka 73% daripada seluruh proyek berada di Jawa. Dari jumlah ini ternyata separohnya berada di Jakarta. Dan umumnya perusahaan dalam negeri lebih menyebar dibandingkan lokasi modal asing.

Perusahaan asing, termasuk perusahaan multinasional ini, selama 1967-1975 mempekerjakan hampir setengah juta orang (418721 orang), dengan perincian 93% pekerja Indonesia dan 7% atau 28 ribu tenaga asing. Berarti rata-rata terdapat 48 ribu saja tenaga kerja Indonesia yang ditampung perusahaan ini per tahunnya. Kalau diperkirakan tingkat pengangguran 8-9% setahun dan jumlah angkatan kerja 41 juta jiwa (1971) maka hanya sekitar 1,5% saja dari jumlah pencari kerja yang bisa diserap oleh perusahaan multinasional ini. Dan berapa di sektor pertanian? Hanyalah kurang dari 12 ribu orang per tahun. Padahal 63% dari angkatan kerja berada di sektor pertanian ini.⁷

Perusahaan dalam negeri ternyata bisa menampung lebih banyak tenaga kerja. Selama 1968-1975 perusahaan-perusahaan itu bisa mempekerjakan 730.745 orang, yang berarti dua kali lebih besar daripada yang bisa ditampung oleh perusahaan-perusahaan modal asing.⁸

6 Sumber: Badan-Penanaman Modal Asing, diturunkan dari Sisdjiatmo, Putulawa, M. Yasin dan Rozy Munir, "Views on Foreign Assistance to Indonesia", School of Public Health, Univ. of Hawaii, 1976, halaman 259.

7 dan 8 Ibid, 260-262.

Masalah penyerapan tingkat tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan modal asing yang rendah ini tidak saja dialami oleh Indonesia tetapi juga oleh negara-negara berkembang lainnya. Dari laporan ILO, Organisasi Buruh Internasional, tahun 1970 terdapat 13-14 juta tenaga kerja baru yang diciptakan perusahaan-perusahaan multinasional tetapi hanya 2 juta saja yang terdapat di negara-negara berkembang padahal pencari kerja di negara berkembang ini bukan main banyaknya yaitu 54 juta (1973).⁹

Dari gambaran di atas sulit diharapkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional ini akan membantu lebih banyak dalam penyerapan tenaga kerja. Terlebih lagi kalau melihat kenyataannya bahwa "trickle-down-effect (aliran ke bawah)" tidak terjadi dalam perekonomian Indonesia dewasa ini.¹⁰

Polusi dan Kesehatan

Aspek lain yang tak kalah pentingnya dan perlu ditinjau adalah yang menyangkut masalah polusi dan kesehatan. Bentuk daripada perusahaan multinasional selain bersifat kompleks, padat modal juga terpusat lokasi-

9 lihat laporan ILO (International Labor Organisation) pada *The Impact of Multinational Enterprises on Employment and Training* Geneva: ILO, 1976.

10 Gambaran Sritua Arief, "INDONESIA: Growth, Income Disparity, and Mass Poverty" (Sritua Arief Associates; Jakarta: 1977), menunjukkan bahwa bukan saja "trickle-down-effect" ini tak terjadi tetapi terlebih lagi adalah kenyataan bahwa penduduk yang berada di bawah "garis kemiskinan" (poverty line) semakin meningkat. Bayangan ideal dari sumbangan perusahaan-perusahaan multinasional yang lebih bersifat "padat modal" ini adalah bahwa dalam taraf perkembangan selanjutnya perusahaan-perusahaan ini akan menumbuhkan perusahaan-perusahaan baru yang "padat kerja (labor intensive technique)" dari hasil investasi mereka. Jadi gambaran dari hubungan yang ideal adalah berdasarkan asumsi:

a) $MPS_1 < MPS_k$

b) $P = f(Y)$; maka

c) $Q = f(K/L)$

di mana,

MPS_1 adalah marginal propensity to save dari proyek yang "labor intensive"

MPS_k adalah marginal propensity to save dari proyek yang "capital intensive"

P adalah Population atau Labor force, Y = Money Income

Q adalah Out-put; dan K = Kapital serta L = Labor

jadi K/L = Capital-Labor ratio.

Dengan memilih proyek yang bersifat "capital intensive" maka intensitas proyek dapat ditingkatkan dengan asumsi bahwa akan meningkatkan "tabungan masyarakat" yang lebih lanjut meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara dengan meningkatnya "income" bisa diharapkan menumbuhkan perusahaan-perusahaan baru yang "labor intensive" maka kesempatan kerja dapat ditingkatkan (lihat hubungan (b)). Ini keadaan ideal yang jarang muncul di dalam perekonomian negara-negara berkembang. Untuk pembahasan lebih lanjut lihat: W. Galenson & H. Leibenstein, "Investment Criteria," *Quarterly Journal of Economics*, August 1955 dan juga F. Stewart and P. Streeten, "Conflicts between Output and Employment Objectives", *Oxford Economic Papers*, July, 1971.

nya pada kota-kota besar, yang biasanya padat penduduknya. Operasi perusahaan multinasional pada kota-kota besar ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan baik polusi udara, tanah maupun pada air seperti asap yang keluar dari cerobong-cerobong pabrik, suara bising dari mesin-mesin serta sampah-sampah dari hasil produksinya. Hal ini, tanpa penanganan dan pengaturan yang wajar, akan menimbulkan gangguan-gangguan pada kesehatan manusia.

Perkembangan dari kemajuan teknik bisa pula mempunyai akibat sampingan, misalnya adanya kebisingan dari mesin-mesin pabrik dan dari kendaraan bermotor. Kebisingan ini akan merusak kapasitas pendengaran, menyebabkan gangguan "neuroses" dan menimbulkan sifat agresif pada manusia, selanjutnya bisa pula berakibat penyakit "cardiac", "circulatory" dan "arterial". Sebagai contoh, satu dari setiap dua orang Jerman mengalami gangguan kebisingan, dan satu dari setiap empat orang penduduknya mengalami kebisingan pada malam hari.¹¹ Contoh lain, suatu penyelidikan di Nashville, Tennessee, menunjukkan bahwa penderita penyakit jantung (incidence of heart) di daerah yang dilanda polusi adalah dua kali lebih tinggi dibandingkan pada penduduk di daerah normal.¹²

Masih contoh di Jerman, akibat pembuangan sampah/kotoran industri dan rumah tangga, terdapat 8 juta ton "carbon monoxide", 2 juta ton "hydrogen chloride" akibat pembakaran "chlorinated hydrocarbonates" serta "fluorine compounds" yang membuat kerusakan pada tanaman-tanaman serta mengakibatkan masalah kesehatan seperti: cancer; bronchites, rickets dan anaemia.¹³

Di samping pengotoran udara, pencemaran pada air laut oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang memakai teknologi modern, juga bisa membuat masalah yang serius. Pembuangan sampah yang mengandung air raksa (mercury organic) ke suatu teluk Minamata di Jepang, dari pengolahan pabrik Chisso Product, memproduksi nitrogenlime fertilizer dan industri kimia, tahun 1908-1965, membuat tragedi kemanusiaan (dikenal dengan "Minamata disease"). Beribu-ribu penduduk dan kehidupan laut lainnya menderita penyakit kelumpuhan syaraf, kerusakan pada panca indera serta cacatnya anggota tubuh lainnya. Perkiraan yang dibuat pada Januari 1975 menyebutkan bahwa selama ini terdapat 3500 kor-

11 Friederich Ebert Stiftung, *One World Only: Industrialization and Environment*. Report 9, 1973, halaman 23.

12 Lester Brown, et al. "Twenty Two Dimensions of The Population Problem." *Worldwatch* Paper No. 5, March 1976, hal. 26.

13 Friederich Ebert Stiftung, *Op.Cit.*, halaman 27.

ban, perkiraan lebih lanjut menyatakan bahwa setidaknya ada 10 ribu penduduk di daerah tersebut merupakan korban laten.¹⁴

Hal serupa ditemukan pada sungai Jintsu di Jepang tahun 1967, di mana banyak sawah, sungai dan tanah yang kena polusi dari "cadmium" hasil pembuangan sampah dari salah satu perusahaan industri modern. Penyakit ini disebut "Itai-itai disease".¹⁵

Pengotoran laut yang lain disebabkan adanya tumpahan minyak yang diakibatkan bocornya kapal-kapal tangki pengangkut, atau adanya kecelakaan kapal di laut serta pengotoran dari tempat pengeboran. Akibat pengotoran minyak ini setiap tahunnya terjadi polusi atau penyemaran di laut sebesar 5-10 juta ton.¹⁶

Beberapa contoh kecelakaan kapal-kapal tangki yang terjadi belakangan ini misalnya: Hawaii Patriot, meledak tahun 1977 di dekat Hawaii menumpahkan minyak mentah sebesar 715 ribu barrel yang berasal dari Indonesia; Argo Merchant menumpahkan 7,5 juta gallon di pulau Nantucket, sedangkan Torrey Canyon kehilangan 119 ribu ton minyaknya di selat Inggris tahun 1967.¹⁷ Kiranya masih segar pula ingatan kita akan kecelakaan kapal tangki Jepang di selat Malaka beberapa tahun yang lalu, yang mengakibatkan gangguan pada kehidupan tumbuhan dan tanaman serta binatang laut.

Perusahaan multinasional yang bergerak dalam makanan bayi dan susu bubuk sering pula menyebabkan masalah pada kesehatan manusia. Tidak jarang perusahaan-perusahaan ini memberikan "image" yang berlebihan pada si ibu seolah-olah susu produksinya lebih baik daripada susu ibu. Padahal tidak demikian kenyataannya. Pemakaian susu bubuk dengan takaran atau campuran air yang tidak sewajarnya ditambah penjagaan kebersihan yang sangat kurang akibat buruknya sanitasi akan menyebabkan masalah bagi si bayi seperti "kekurangan gizi", "nutritional marasmus" dan kontaminasi yang menyebabkan "diarrhea" dan sebagainya.¹⁸

Pembahasan di atas menggambarkan adanya "externalities" yang sifatnya tidak menyumbang dalam pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh operasi perusahaan-perusahaan multinasional ini di suatu negara. Apabila "external diseconomies"-nya lebih besar dari "external eco-

14 dan 15 Norie Huddle, et al., *Island of dreams, Environmental in Japan Crisis*. New York: Autumn Press, 1975, hal. 103-131. Lihat juga International Congress on Occupational Health, *Environmental Health in Japan*, Tokyo: 1969, hal. 31.

16 Friederich Ebert Stiftung, Op. cit.

17 Honolulu Star Bulletin, March 3, 1977.

18 lihat lebih lanjut tulisan Rozy Munir, "Susu Sapi Untuk Anak Sapi dan Susu Ibu Untuk Bayi", *Sinar Harapan*, 3 Agustus 1977.

nomies"nya, jelas bahwa perkembangan perekonomian di negara tersebut berada dalam taraf yang tak dapat dikatakan menggembirakan.¹⁹

Penutup

Pembahasan dalam artikel ini mengantarkan suatu kenyataan pahit bahwa harapan dari negara-negara sedang berkembang, dalam usaha memperbaiki perekonomiannya, melalui hubungan dengan negara-negara maju lewat perusahaan-perusahaan multinasional sering tidak terpenuhi. Keuntungan yang diharapkan diperoleh, tak jarang berbalik menjadi beban bagi perekonomian negara-negara sedang berkembang tersebut.

Apabila kehadiran perusahaan-perusahaan ini masih diperlukan dengan alasan "transfer of technology" seyogyanya perusahaan-perusahaan tersebut diajak berpartisipasi misalnya dalam usaha melatih tenaga kerja untuk sektor-sektor industri kecil dan membiayai usaha-usaha penelitian serta "extension program" di bidang pertanian. Jelas bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tak dapat diharapkan memperluas kesempatan kerja dan menyerap pengangguran yang sebagian besar terdapat di sektor pertanian. Bila "direct effect" tak dapat diharapkan, apa salahnya dicari "indirect benefit" dari perusahaan-perusahaan ini.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian lebih serius adalah masalah polusi, baik udara maupun air, yang dibawa perusahaan-perusahaan ini. Peraturan-peraturan untuk menghindari hal ini harus diadakan dan diperketat bila kita tak ingin mengulang peristiwa "Kawasaki Steel Company" yang terjadi di Philippina. "Kawasaki" ternyata hanya bertujuan memindahkan polusi dari Jepang ke Philippina, setelah pabrik mereka di Chiba, Jepang, mendapat protes keras dari mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat Jepang.

Perusahaan multinasional memang mungkin masih kita perlukan untuk alasan-alasan tertentu. Tetapi hendaknya alasan-alasan tersebut tidak mengalahkan keuntungan ekonomis dari "undangan dan keramah-tamahan" terhadap perusahaan-perusahaan itu.

¹⁹ Lihat: T. Page, *Economics of Involuntary Transfer*, (Springer Verlag Berlin; Heidelberg: 1973), khususnya hal. 82-112 yang menyangkut masalah polusi udara di kota London, sebagai contoh dari ujian teoritis.